

ABSTRAK

Syafiah Chaerunisa (01656190126)

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PEMBANGUNAN RUKO ANTARA DEVELOPER DAN PEMILIK TANAH DITINJAU DARI CAUSA DALAM PERJANJIAN

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1464 K/PDT/2016)

(xi + 132 halaman; 4 lampiran)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yuridis penyebab terjadinya kebatalan dan pembatalan akta notaris dan juga implikasi hukumnya berdasarkan causa dalam perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau doktrinal yang mempunyai sifat preskriptif, menggunakan pendekatan Undang-Undang mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum secara analisis deduksi. Perjanjian bagi hasil bangunan rumah toko merupakan perjanjian tidak bernama karena belum diatur khusus dalam undang-undang. Dalam suatu perjanjian bagi hasil tidak jarang terjadi masalah. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah tergugat tidak melaksanakan perjanjian bagi bangun yang dituangkan dalam akta perjanjian bagi hasil No. 23 tanggal 31 Juli tahun 2009 di anggap sudah tidak sanggup dan sudah wanprestasi.

Referensi: 101 (1945-2022)

Kata kunci: Akta Notaris, pembagian bagi hasil, wanprestasi

ABSTRACT

Syafiah Chaerunisa (01656190126)

LEGAL IMPLACTION OF PROFIT SHARING AGREEMENT FOR SHOPHOUSE DEVELOPMENT BETWEEN DEVELOPER AND LAND OWNER BASED ON AGREEMENT'S PROVISION

(CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 1464 K/PDT/2016)

(xi + 132 pages; 4 attachments)

This research aims to know the reasons for the occurrence of nullification causes of juridical and cancellation of the notarial document and also the implications of the ruling based on law provision based on agreement in accordance to Indonesian Civil Code. This research included in this type of normative or doctrinal research which has the nature of a prescriptive approach, using the law study materials of primary and secondary law. Profit sharing contract of shop-house is not legal since it is not specified in law. Djaren Saragih points out that it is legal relation between a land owner and another party that is allowed to cultivate the land on condition that the land product will be shared equally between them, but this contract causes a problem: the defendant did not implement construction sharing specified in the Profit Sharing Contract No. 23 on July 31, 2009, was default.

Reference: 101 (1945-2022)

Keywords: A notarial document, Profit Sharing Contract, Default